

**BRAINSTORMING VISUALIZATION IN PARTICIPATORY CLASS DALAM IDENTIFIKASI ALTERNATIF KEBIJAKAN PENYANDANG DISABILITAS**

**Sugeng Esa Saputro**

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, [Sugeng.dok@gmail.com](mailto:Sugeng.dok@gmail.com)

**Dede Kuswanda**

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, [dedekuswanda@gmail.com](mailto:dedekuswanda@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*Persons with disabilities are defined as people who experience physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations, which in interaction may cause obstacles and difficulties. The policy for persons with disabilities in the East Jakarta Administrative City is the government's effort to respect, protect, and fulfill the rights of persons with disabilities, one of which is carried out by the East Jakarta Administrative City Social Service (Sudinsos). This research follows up on the social policy analysis technology engineering practicum, which aims to develop a brainstorming visualization in participatory (VIP) class technique for identifying alternative policies for persons with disabilities in the East Jakarta Administrative City Sub-Department of Social Affairs. This technique was developed to simplify and increase the creativity and participation of brainstorming participants in expressing their ideas. This research method uses a qualitative approach with a Participatory Action Research (PAR) research design and is presented descriptively. Data sources are all statements and actions shown by informants and participants consisting of policy implementers at the East Jakarta Administrative City Sub-Department of Social Affairs. The results of this study indicate the need for 1) developing model designs towards digitization 2) using digital tools 3) Exposure to issues and predictions informed earlier 4) ideas that arise are conveyed directly to encourage other participants to be more creative. The use of online forums and digital tools that are considered more in line with the needs of today's era The busyness of policy implementers is considered an obstacle when carrying out face-to-face activities. Digital tools are also more diverse, interesting, and in accordance with the smartphone era than conventional tools such as paper and whiteboards. Therefore, VIP class brainstorming techniques were developed into online forums and digital applications.*

**Keywords:**

*Persons with disabilities, brainstorming, policy alternative identification, East Jakarta Social Service*

**ABSTRAK**

Penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dalam berinteraksi dapat mengalami hambatan dan kesulitan. Kebijakan bagi penyandang disabilitas di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah usaha Pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang salah satunya dilaksanakan oleh Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini menindaklanjuti praktikum rekayasa teknologi analisis kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan teknik *brainstorming visualisation in partisipatory (VIP) class* pada identifikasi alternatif kebijakan

penyandang disabilitas di Sudinsos Kota Administrasi Jakarta Timur. Teknik ini dikembangkan untuk mempermudah dan meningkatkan kreatifitas serta partisipasi peserta *brainstorming* untuk mengeluarkan ide gagasannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian *Participatory Action Research (PAR)* dan disajikan secara deskriptif. Sumber data adalah semua pernyataan dan tindakan yang ditunjukkan oleh informan dan partisipan yang terdiri dari para pelaksana kebijakan di Sudinsos Kota Administrasi Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan kebutuhan 1) pengembangan desain model kearah digitalisasi 2) penggunaan *tools* digital 3) paparan mengenai isu masalah dan prediksi diinformasikan lebih awal 4) ide gagasan yang muncul disampaikan secara langsung untuk mendorong peserta lain lebih kreatif. Penggunaan forum online dan *tools* digital yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan di era sekarang ini. Kemudian, kesibukan para pelaksana kebijakan dinilai menjadi kendala ketika melakukan kegiatan secara tatap muka. Tools digital juga lebih beragam, menarik, dan sesuai dengan era *smartphone* dari pada tools konvensional seperti kertas dan papan tulis. Oleh karena itu, teknik *brainstorming VIP class* dikembangkan menjadi forum online dalam aplikasi digital.

**Kata kunci :**

*penyandang disabilitas, brainstorming, identifikasi alternatif kebijakan, Sudinsos Jakarta Timur*

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016). Menurut Sardi dalam Violetta (2020) permasalahan aksesibilitas penyandang disabilitas masih terjadi di Indonesia dan perlu segera ditangani. Belum lagi masalah aktualisasi penyandang disabilitas, seperti informasi yang diberikan Kepala Seksi Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (Perlinjamrehsos) bahwa masih ada orang tua yang menyembunyikan anaknya yang memiliki kedisabilitas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang sering ditemukan belum tercatat dalam data penyandang disabilitas.

Pemerintah memiliki posisi vital dalam memegang penuh penyandang disabilitas, selalu saja ada anggapan dan lontaran pedas dari masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak berguna dan payah terutama hal pekerjaan (Allo, 2022). Isu permasalahan penyandang disabilitas tidak terlepas dari isu ekonomi. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam KBR (2022) penyandang disabilitas terpaksa harus membuka usaha sendiri karena sulit untuk masuk di pasar kerja dan masih minimnya alternatif pekerjaan yang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah merumuskan berbagai kebijakan yang menjadi dasar pelayanan kepada penyandang disabilitas. Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 2019 telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian

Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas. Laporan rekomendasi kebijakan kajian disabilitas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2021 menggambarkan grafik hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2020, mengenai perbandingan penyandang disabilitas (PD) miskin yaitu 11,42%, dengan non PD miskin 9,63%. Perbandingan kemiskinan PD tunggal 9,44%, Non PD 9,63%, dan PD ganda menempati angka paling tinggi yaitu 13,38%. Grafik tersebut menunjukkan bahwa fokus utama dalam penanganan penyandang disabilitas di Indonesia adalah pada kesejahteraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah baik pada sektor pusat maupun daerah telah banyak merumuskan kebijakan yang mengatur dan memperjuangkan hak-hak dan martabat penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menjadi landasan hukum yang kuat bagi perjuangan kesejahteraan penyandang disabilitas. Tiga tahun setelahnya pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang disusul berbagai regulasi kebijakan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Regulasi kebijakan sosial yang terbaru juga telah diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada akhir tahun 2022, yaitu dengan menetapkannya Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai salah satu pelaksana kebijakan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas di wilayah DKI Jakarta, Sudinsos Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi tempat atau lokus bagi mahasiswa program magister terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung pada praktikum rekayasa teknologi profil analisis kebijakan sosial. Praktikum ini adalah tahapan bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuannya dalam melakukan analisis kebijakan sosial dan juga mengembangkan atau merekayasa teknologi dalam analisis kebijakan sosial. Pada proses atau langkah dalam melakukan analisis kebijakan ini, mahasiswa menemukan kurang efektifnya teknik *brainstorming* yang digunakan pada tahap identifikasi alternatif kebijakan. Ada 12 metode dalam Patton, Sawicki, dan Clark (2016) pada tahap identifikasi alternatif kebijakan yang salah satunya adalah metode atau teknik *brainstorming* (curah pendapat). Teknik ini seharusnya dapat menghasilkan pilihan alternatif kebijakan yang kreatif dan tepat sasaran karena berasal dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Pelaksana kebijakan sebagai narasumber dalam identifikasi alternatif kebijakan ini kurang dapat menunjukkan partisipasinya. Status jabatan, kurang percaya diri, dan senioritas menjadi kendala dalam curah pendapat (*brainstorming*), sehingga pilihan alternatif kebijakan sangat terbatas baik dalam jumlah maupun kreatifitasnya.

Peneliti telah merumuskan atau mendesain rekayasa teknologi teknik *brainstorming* untuk meningkatkan partisipasi pelaksana kebijakan dalam curah pendapat merumuskan pilihan

alternatif kebijakan melalui *Visualisation In Participatory Programmes (VIPP)*, sehingga desain hasil rekayasanya disebut Teknik *Brainstorming VIP Class*. Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan teknik tersebut peneliti melakukan penelitian “Pengembangan Teknik *Brainstorming Visualisation In Participatory Class* pada Identifikasi Alternatif Kebijakan Penyandang Disabilitas Di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur”.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode *Participatory Action Research (PAR)* dengan jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara mendalam dan mendetail. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah semua pernyataan yang dikemukakan informan atau partisipan dan penelitian ini. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2013:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan. Partisipan dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan layanan sosial bagi penyandang disabilitas yang ada di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu, Kepala Sudinsos, Kasubbag TU, Kepala Seksi Perlinsos, Kepala Seksi Rehsos, Staf Seksi Rehsos, Satpel Sosial Kecamatan, Koordinator Kecamatan (pendamping sosial), Fungsional Analisis Kebijakan Bidang Kesos.

Keabsahan data dalam penelitian ini akan ditentukan dan diperiksa melalui metode penelitian sesuai dengan teknik penentuan atau pemeriksaan keabsahan data dalam pendekatan kualitatif menurut Moleong (2013:321) terdiri dari kredibilitas data, keteralihan (*transferability*), kebergantungan

(*depenability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*). Peneliti melakukan tiga cara dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu dengan cara observasi partisipatif, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini juga telah diuji keabsahannya menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

### a. Gambaran Lokasi Penelitian dan Kebijakan

Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu Unit Kerja Pemerintah Daerah (UKPD) di bawah Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kepala Sudinsos Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinsos Provinsi DKI Jakarta. Sudinsos dalam menjalankan administrasinya berkoordinasi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang sosial di wilayah Kota Administrasi. Oleh karena itu, Sudinsos Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang sosial di wilayah Kota Administrasi.
2. Pengelolaan data dan informasi bidang sosial di wilayah Kota Administrasi.
3. Pelaksanakan Rehabilitasi Sosial luar panti melalui Unit Informasi dan layanan Sosial dan Loka Bina Karya.
4. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi bidang sosial.
5. Pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang sosial di wilayah Kota Administrasi.
6. Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
7. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Sosial Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Landasan hukum yang menjadi dasar dari semua kebijakan bagi penyandang disabilitas di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menjadi pondasi bagi terselenggaranya berbagai program kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi pandangan baru dan mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 yang masih menggunakan istilah penyandang cacat. Kemudian apabila kita lihat ragam disabilitas dari undang-undang ini, dapat kita jumpai lagi undang-undang yang lebih mengkhususkan pada ragam disabilitas tertentu seperti pada undang-undang yang disahkan lebih dahulu pada tahun 2014 yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang lain yang mengatur terlaksananya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Pemerintah (PP) juga telah telah mendukung terlaksananya pelayanan-pelayanan bagi penyandang disabilitas seperti PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas, PP Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas. PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman Pelayanan Publik dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, dan PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Presiden kemudian juga telah mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2020. Perpres ini menyambut peraturan pemerintah pada tahun sebelumnya mengenai perencanaan Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan dan

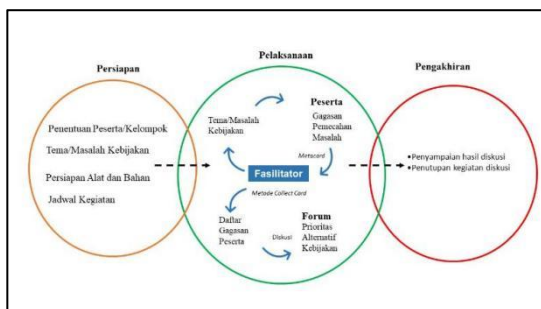
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perencanaan yang kemudian disambung dengan tata cara merupakan bentuk hubungan kebijakan yang secara vertikal saling mendukung. Kemudian pada tahun 2020 juga presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang dibentuk dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tidak terputus disitu kementerian sosial melalui Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 16 Tahun 2021 tentang tim koordinasi nasional upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tahun 2021 merupakan rangkaian kebijakan yang ikut mendukung dalam memperjuangkan penyandang disabilitas di Indonesia.

Berbicara kebijakan yang saling mendukung dan berkelanjutan pada kesempatan ini peneliti fokus pada kebijakan daerah bagi penyandang disabilitas di lokasi penelitian ini, yang pertama adalah mengenai peraturan daerah DKI Jakarta yang belum lama ini disahkan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menguatkan komitmennya dalam memperjuangkan penyandang disabilitas khususnya di Wilayah DKI Jakarta. Perda ini menggambarkan keseriusan dan dukungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Selain itu, Perda Nomor 4 Tahun 2022 juga menguatkan komitmen dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan bagi penyandang disabilitas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya sudah berjalan. Dalam hal ini peneliti

memfokuskan pada kebijakan sosial yang dalam hal ini yang diberikan tanggungjawabnya kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

**b. Model Awal Teknik *Brainstorming VIP Class***

Teknologi ini bernama *Brainstorming Visualization In Partisipatory (VIP) Class*. Teknik ini mengembangkan *brainstorming* menjadi lebih interaktif, tetapi peserta lebih bebas dalam menyampaikan ide gagasannya secara tertulis, sehingga kerahasiaan dari pemilik ide lebih terjaga. Para peserta tidak lagi mengkhawatirkan status dan jabatannya dalam memberikan ide alternatif kebijakan sebagai bagian dari pelaksana kebijakan. Desain rekayasa teknologi *Brainstorming Visualization In Partisipatory (VIP) Class* adalah sebagai berikut :



**Gambar1** Desain Awal Teknik *Brainstorming Visualization In Partisipatory (VIP) Class*

**c. Perencanaan Pengembangan Teknik *Brainstorming VIP Class***

Pada tahapan ini, peneliti bersama para partisipan melaksanakan kegiatan perencanaan pengembangan dan implementasi *Teknik Brainstorming Visualization In Participatory Class* dalam Identifikasi Alternatif Kebijakan Penyandang Disabilitas Di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada tahap penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik *Focus Group Discussion (FGD)* pada hari Kamis, Tanggal 8 Mei 2023 bersama partisipan untuk merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan apa saja yang harus disiapkan sebelum mengimplementasikan teknik tersebut. FGD dilaksanakan dengan forum langsung yang dihadiri oleh Kepala Sudinsos Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelayanan Sosial Kecamatan, Staff Sudinsos, dan perwakilan Pendamping Sosial Kelurahan.

**d. Implementasi Teknik *Brainstorming VIP Class***

Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan ini mengangkat kendala dalam kebijakan pemberian Alat Bantu Fisik (ABF) kepada penyandang disabilitas khususnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur atau lebih tepatnya Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. Ide gagasan alternatif kebijakan yang akan dikumpulkan adalah untuk menangani masalah tidak adanya data ragam disabilitas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti bersama partisipan melakukan tiga tahapan yaitu menentukan peserta kegiatan, menentukan pokok masalah atau tema masalah yang diangkat, dan mempersiapkan alat, bahan serta tempat kegiatan. Dalam menentukan peserta kegiatan peneliti bekerjasama dengan partisipan yang merupakan pejabat dan staff yang ada di Sudinsos Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan menggunakan teknik *brainstorming VIP Class* terdiri dari beberapa sesi yaitu, pembukaan, presentasi isu masalah, pengumpulan ide gagasan menggunakan teknik *colect card* (mengumpulkan kartu), diskusi kelompok kecil, dan presentasi hasil diskusi. Ide Alternatif Kebijakan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

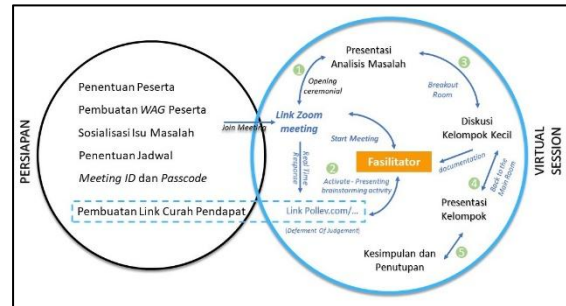
- a) Pendataan ragam disabilitas melalui *home visit* oleh Suku dinas sosial, Pusdatin, dan Suku dinas Kesehatan.
  - b) Menggunakan data Kartu Penyandang Disabilitas (KPDj) sebagai data awal untuk mengklasifikasikan disabilitas bersama pihak kelurahan dan pendamping sosial.
  - c) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan kebijakan pemberian ABF bagi penyandang disabilitas.
  - d) Aksesibilitas dan ketersediaan data ragam disabilitas bagi Sudinsos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran adalah tahap penarikan kesimpulan dan pengakhiran sesi curah pendapat dalam identifikasi alternatif kebijakan pemberian ABF bagi penyandang disabilitas. Tahap ini terdiri dari proses penarikan kesimpulan yang difasilitasi oleh fasilitator dengan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Fasilitator memastikan bahwa hasil diskusi kelompok partisipan dapat dijadikan sebagai usulan atau ide gagasan dalam alternatif kebijakan yang nantinya dapat dituangkan kembali dalam sebuah *Policy Brief*. Partisipan menyetujui bahwa semua ide gagasan atau pendapat dari hasil diskusi kelompok menjadi

usulan dalam *policy brief* yang akan disampaikan kepada pembuat kebijakan.

#### e. Refleksi dan Desain Akhir Teknik *Brainstorming VIP Class*

Peneliti merumuskan sebuah desain baru yang telah penelliti diskusikan bersama dengan partisipan melalui forum *Focus Group Discussion (FGD)*. Sehingga menghasilkan desain akhir sebagai berikut.



**Gambar 2** Desain Akhir Teknik *Brainstorming VIP Class*

### PEMBAHASAN

#### a. Model Awal Teknik *Brainstorming VIP Class*

Desain awal teknik *brainstorming VIP class* ini merupakan hasil dari pelaksanaan praktikum rekayasa teknologi pada profil analisis kebijakan yang dilaksanakan di lokasi dan sasaran seting kebijakan yang sama yaitu kebijakan bagi penyandang disabilitas di Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Kota Administrasi Jakarta Timur. Desain rekayasa teknologi ini terbentuk untuk meningkatkan teknik curah pendapat (*brainstorming*) pada saat melakukan analisis kebijakan pada tahap identifikasi alternatif kebijakan. Dalam proses analisis kebijakan menurut Patton dan Sawicki (2016), identifikasi alternatif kebijakan (*identifying alternatives*) adalah tahapan ketiga setelah tahap mengidentifikasi masalah dan menentukan kriteria evaluasi. Teknik *brainstorming* adalah pilihan teknik yang digunakan pada identifikasi



alternatif kebijakan di Sudinsos Kota Administrasi Jakarta Timur. Teknik ini dipilih karena memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk menyumbangkan ide gagasan mereka dalam menangani masalah yang diangkat. Sudinsos merupakan Unit Kerja Pemerintah Daerah (UKPD) yang berisikan para pelaksana kebijakan dibawah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemilihan ide alternatif kebijakan diambil dari ide dan gagasan pelaksana kebijakan yang menguasai semua problematika yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Desain awal teknik brainstorming VIP class yang dikembangkan dalam penelitian ini awalnya diciptakan untuk membantu memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi para pelaksana kebijakan dalam proses analisis kebijakan.

Teknologi ini menciptakan sebuah tahapan proses curah pendapat yang didalamnya menggunakan teknik pengumpulan kartu (colect card) dalam metode VIPP yang memungkinkan semua peserta memberikan pendapat mereka dan menguatkan prinsi penanguhan penilaian pada ide gagasan yang dimunculkan. Kekhasan dalam desain awal teknik brainstorming VIP class ada pada sitematika dan prosedur pelaksanaannya. Presentasi isu masalah yang disampaikan pada awal pelaksanaan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian pengumpulan ide gagasan tidak lagi disampaikan secara verbal melainkan melalui tulisan dan dilakukan secara pribadi sehingga memungkinkan kerahasiaan dari si pemilik ide. Sementara itu penilaian dan seleksi dilakukan pada sesi-sesi

akhir agar setiap peserta merasa memiliki pengaruh yang sama untuk terlibat dalam suatu proses analisis kebijakan. Dalam sebuah analisis kelayakan, teknologi ini juga memiliki kekuatan dan keunggulan daripada teknologi sebelum direkayasa. Rekayasa teknologi ini mendorong partisipasi aktif dari anggota setiap anggota kelompok, meminimalisir rasa kurang percaya diri, enggan atau malu dari anggota kelompok untuk menyampaikan pendapatnya, diskusi yang dilakukan lebih menarik dan tidak membosankan, tergolong mudah untuk diterapkan dan dipahami oleh anggota kelompok.

#### **b. Perencanaan Pengembangan Teknik *Brainstorming VIP Class***

Perencanaan implementasi dan pengembangan Teknik *Brainstorming VIP Class* dilakukan bersama dengan partisipan melalui sebuah forum melalui proses dalam *focus group discussion* (FGD) atau dapat diartikan sebagai kelompok diskusi terarah. FGD merupakan proses yang melibatkan partisipan-partisipan, dimana mereka melakukan pertukaran pesan secara dialogis dalam kerangka pemahaman bersama atas situasi sosial (Dedeh 2005). Peneliti mencoba membangun partisipasi dari partisipan penelitian dalam merencanakan pengembangan dan implementasi teknik *brainstorming VIP class*. Dalam proses penelitian tindakan partisipatif menurut Suwarsih (2011) Sebagai bagian dari proses perencanaan, para praktisis harus berkolaborasi dalam diskusi untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman dan tindakan mereka dalam situasi terkait. Oleh karena itu, peneliti dalam tahap ini berkolaborasi dengan para partisipan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait peranan

mereka dalam penelitian juga menjalin komitmen dalam menyelesaikan penelitian ini.

Pada tahap perencanaan ini mulai dipahami semua kebutuhan dalam menjalankan penelitian dan mengimplementasikan teknik *brainstorming VIP class* untuk melakukan identifikasi alternatif kebijakan pemberian alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur. Moleong (2014), mengartikan partisipan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi terkait dengan topik penelitian yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pada tahap ini partisipan ikut berpartisipasi dalam merencanakan jalannya proses penelitian. Dalam merencanakan implementasi teknik *brainstorming VIP class* partisipan ikut dalam menyusun semua aspek kebutuhan yaitu kebutuhan akan sarana dan prasarana, kebutuhan administrasi, kebutuhan biaya dan penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Sarana yang dibutuhkan dalam implementasi teknik *brainstorming VIP class* adalah semua alat yang dapat menunjang dalam pelaksanaan setiap sesinya nanti sementara prasarana yang dipilih adalah yang dapat menampung seluruh partisipan yang ikut berperan dalam penelitian ini yang berjumlah 21 orang. Selanjutnya, kebutuhan administrasi bertujuan sebagai syarat terlaksananya kegiatan identifikasi alternatif kebijakan pemberian alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas yaitu, surat resmi dari kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur dan daftar hadir partisipan.

Kebutuhan yang selanjutnya adalah biaya yang terdiri dari biaya

konsumsi, biaya pengadaan alat dan bahan, dan biaya kebersihan ruangan. Kebutuhan biaya ditanggung oleh peneliti dan dibantu oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini disebabkan penelitian ini telah dianggap penting sebagai bagian dari pelaksanaan kedinasan bagi para partisipan. Oleh karena itu, biaya konsumsi dapat ditanggung oleh pihak instansi. Sementara itu, biaya dalam pengadaan alat dan bahan menjadi tanggungan peneliti. Kemudian pada bagian terakhir yaitu menentukan jadwal kegiatan, disesuaikan dengan kesediaan jadwal kedinasan oleh pimpinan yaitu pada Hari Senin, Tanggal 8 Mei 2023. Semua rangkaian perencanaan implementasi teknik *brainstorming VIP class* ini sangat mendapatkan dukungan baik dari pimpinan dan jajarannya sehingga dapat berjalan dengan lancar.

### c. Implementasi Teknik *Brainstorming VIP Class*

Tahap implementasi dalam penelitian ini merupakan tahapan utama dimana peneliti bersama partisipan untuk pertama kalinya melaksanakan identifikasi alternatif kebijakan menggunakan teknik *brainstorming VIP class*. Kegiatan ini adalah uji coba bagaimana teknik *brainstorming VIP class* dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan mengenai aspek dalam indikator keberhasilannya. Implementasi teknik *brainstorming VIP class* terdiri dari tiga tahapan sesuai dengan desain awal yang telah dirumuskan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran. Pembahasan dari hasil pelaksanaan ketiga tahapan tersebut peneliti sajikan sebagai berikut :

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan yang terdiri dari empat poin kegiatan, peneliti bersama partisipan bersama-sama mempersiapkan penentuan peserta, penentuan dan penyusunan tema/isu masalah kebijakan pemberian alat bantu fisik, mempersiapkan alat dan bahan, dan membuat jadwal dan susunan acara.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan peneliti bersama partisipan bertemu kembali secara tatap muka langsung di tempat dan jadwal yang telah ditetapkan dan diinformasikan di dalam surat undangan yaitu pada Hari Senin, Tanggal 8 Mei 2023 pukul 10.00 WIB dan bertempat di ruang rapat Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada tahap pelaksanaan ada lima orang partisipan yang berhalangan hadir disebabkan ada kegiatan dinas yang mendadak dan tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, pada tahap pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 16 orang partisipan.

Pembukaan sesi *brainstorming VIP class* dilakukan oleh partisipan MH yaitu Ibu Kasubbag Tata Usaha. Pada sesi ini pertemuan ini terasa lebih serius dan partisipan mulai memperhatikan dan mengikuti sesi dengan baik. Partisipan MH yang membuka sesi ini juga memberikan motivasi dan semangat kepada partisipan yang lain yang disambut juga dengan semangat. Setelah sesi pembukaan semangat peserta dan perhatiannya terlihat lebih baik dan menunjukkan gestur tubuh yang lebih tegap dan terlihat siap menyimak sesi berikutnya. Selanjutnya dilanjutkan pada sesi presentasi isu masalah dimana menurut Alijoyo (2017) keterbatasan *brainstorming* salah satunya adalah "Peserta mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi contributor yang efektif". Dengan demikian, fasilitator mulai

mempresentasikan isu masalah kepada partisipan dan disambut dengan partisipan yang terlihat memperhatikan presentasi dengan sangat baik. Seluruh partisipan menatap layar proyeksi dimana bahan presentasi ditampilkan dan sesekali melihat ke arah fasilitator dan menunjukkan respon yang mulai memahami isi presentasi. Hal ini dibuktikan pada kesempatan tanya jawab, peserta memiliki ketertarikan dalam menanggapi materi presentasi.

Sesi berikutnya dapat dikatakan sebagai sesi utama dalam teknik *brainstorming VIP class*, karena sesi ini merupakan bagian dimana semua partisipan memunculkan ide gagasan mereka untuk menangani isu masalah yang ada dalam curah pendapat. Curah pendapat pada sesi ini menggunakan teknik atau model *collect card*. Model ini merupakan salah satu model dalam program visualisasi partisipatif (*Visualization In Participatory Programmes*). Model ini dilakukan dengan mengarahkan partisipan untuk menuliskan ide/gagasan mereka melalui sebuah kertas, sehingga memungkinkan untuk merahasiakan siapa sumber dari suatu ide/gagasan tersebut. Hal ini akan mengurangi rasa kurang percaya diri dari partisipan dalam menyampaikan pendapatnya. Kelemahan *brainstorming* menurut Alijoyo (2017:10) yaitu "Terdapat dinamika kelompok tertentu di mana beberapa orang dengan ide-ide yang berharga tetap diam sementara yang lainnya mendominasi diskusi". Kelemahan tersebutlah yang kemudian dihindari oleh peneliti dengan teknik *collecting card* ini sehingga sesi curah pendapat akan lebih maksimal dibandingkan dengan *brainstorming* yang standar. Setelah semua pendapat terkumpul barulah fasilitator membacakan dengan lantang semua isi

kartu pendapat dan kemudian menempelkannya di papan tulis. Dalam penempelan fasilitator juga mengarahkan peserta untuk bersama-sama mengkategorikan isi dari kartu pendapat. Semakin banyak jumlah kartu dalam satu kategori berarti juga menunjukkan pentingnya alternatif tersebut dalam menyelesaikan masalah.

Sesi selanjutnya pada tahap pelaksanaan ini adalah sesi diskusi kelompok kecil. Menurut Nove dkk. (2021) “Teknik diskusi merupakan kegiatan bertukar pikiran dan informasi yang dilaksanakan dalam bimbingan kelompok dengan tujuan mencapai target bersama”. Menurut Paatton dan Sawicki (2016) kelompok dengan jumlah anggota 4 sampai dengan 12 orang adalah jumlah terbaik untuk menghasilkan ide yang terbaik. Pada sesi ini fasilitator membagi partisipan dalam sebuah kelompok kecil yang terdiri dari empat anggota yang kemudian diarahkan untuk melakukan diskusi mengenai ide alternatif kebijakan mana yang menurut mereka paling baik. Fasilitator juga meminta kelompok untuk menuliskan apa kelebihan dari ide alternatif yang mereka pilih dan apa tantangannya. Pada sesi ini masing-masing kelompok berdiskusi dengan antusias dan menghasilkan pilihan alternatif kebijakan yang menarik.

Setelah diskusi kelompok kecil selesai, fasilitator kemudian memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Hasil diskusi kemudian akan menjadi alternatif kebijakan yang akan dipertimbangkan menjadi daftar alternatif kebijakan dalam *policy brief*.

### 3. Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan tahapan dimana fasilitator memfasilitasi penarikan kesimpulan hasil diskusi dan penutupan. Menurut Andini dkk. (2020:47) “Kesimpulan adalah suatu proposisi (kalimat yang disampaikan) yang diambil dari beberapa premis (ide pemikiran) dengan aturan-aturan inferensi (yang berlaku). Pada implementasi teknik *brainstorming VIP class* kesimpulan hasil diskusi merupakan kumpulan dari ide gagasan dari peserta yang dinilai memiliki kualitas yang terbaik sebagai ide usulan alternatif kebijakan. Pada sesi curah pendapat ini kumpulan ide disaring menjadi beberapa ide yang memiliki kualitas terbaik menurut para partisipan.

#### d. Refleksi dan Desain Akhir Teknik *Brainstorming VIP Class*

Desain akhir *brainstorming VIP class* dalam identifikasi alternatif kebijakan bagi penyandang disabilitas di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah dikembangkan dalam penelitian ini memiliki aspek baru dalam setiap sesinya dan telah mengalami perubahan dalam desain akhirnya. Perubahan desain tersebut merupakan suatu pengembangan dalam memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dalam desain awal. Desain akhir *brainstorming VIP class* menyajikan metode, teknik dan penggunaan alat yang baru yang menawarkan kemudahan serta efektifitas dan efisiensi dari segi waktu dan biaya. Selanjutnya, implementasi *brainstorming VIP class* apabila diterapkan kembali dalam proses identifikasi alternatif kebijakan bagi penyandang disabilitas di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur akan lebih sesuai dengan pola kerja dan kebiasaan para pelaksana kebijakan. Dengan demikian, ide gagasan yang

akan dihasilkan dapat lebih baik dan berkualitas. Berikut ini adalah perbandingan antara desain awal dan desain akhir teknik *brainstorming VIP class* pada identifikasi alternatif kebijakan bagi penyandang disabilitas di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kategori	Desain Awal	Desain Akhir
Strenght	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok.</li> <li>2. Meminimalisir rasa kurang percaya diri, enggan atau malu dari anggota kelompok untuk menyampaikan pendapatnya.</li> <li>3. Diskusi yang dilakukan lebih menarik dan tidak membosankan.</li> <li>4. Mudah untuk diterapkan dan dipahami oleh anggota kelompok.</li> <li>5. Memiliki waktu pelaksanaan lebih singkat dibandingkan dengan <i>brainstorming</i> dengan <i>Round Robin</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh peserta.</li> <li>2. Meningkatkan kesempatan untuk menjangkau ide gagasan dari pelaksana kebijakan secara lebih luas.</li> <li>3. Meningkatkan percaya diri dari peserta kegiatan.</li> <li>4. Pelaksanaan sesi curah pendapat lebih menarik.</li> <li>5. Meningkatkan kreatifitas para peserta untuk menghasilkan ide gagasan alternatif kebijakan.</li> <li>6. Dapat di akses dari berbagai lokasi oleh peserta.</li> <li>7. Pelaksanaan sesi curah pendapat lebih praktis, efektif dan efisien.</li> <li>8. Koordinasi dan komunikasi lebih intens.</li> <li>9. Isu masalah lebih dipahami oleh seluruh peserta.</li> <li>10. Penggunaan tools digital dapat diakses hanya dengan satu perangkat/ satu alat.</li> </ol>
Weakness	Membutuhkan <i>tools</i> atau perlengkapan dalam memfasilitasi peserta curah pendapat.	
Opportunities	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan dari lembaga terkait melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan <i>brainstorming</i>.</li> <li>2. Lembaga memiliki SDM yang mumpuni untuk mempelajari teknik dan menjadi fasilitator.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga/instansi memiliki semua peralatan yang dibutuhkan.</li> <li>2. Jaringan internet kuat.</li> <li>3. Peserta atau target sasaran menguasai teknologi yang dibutuhkan</li> </ol>
Treath	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan teknik ini belum pernah dilaksanakan.</li> <li>2. Membutuhkan fasilitator yang dapat memahami dan</li> </ol>	Membutuhkan penguasaan teknologi agar lebih menarik dan maksimal.

**Gambar 3** Perbandingan Analisis Kelayakan Desain Awal dan Desain Akhir

## KESIMPULAN

Penelitian tindakan partisipatif atau *Participatory Action Reaserch (PAR)* ini bertujuan untuk melakukan pengembangan dalam desain teknik *brainstorming VIP class* pada identifikasi alternatif kebijakan bagi penyandang disabilitas di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam penelitian ini peneliti tidak bekerja sendiri melainkan membangun kerjasama dengan para partisipan dalam mengimplementasikan teknik

*brainstorming VIP class* untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan pemberian alat bantu fisik yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2019. Melalui tahap implementasi desain awal teknik *brainstorming VIP class* mendapatkan beberapa masukan pengembangan dari berbagai pernyataan informan penelitian dan tindakan yang dapat dilihat dan diamati dari semua partisipan yang terlibat dalam penelitian ini.

Setelah dilaksanakannya implementasi teknik *brainstorming VIP class* terjadi perubahan pada model dan prosedur pelaksanaan yang dirumuskan sebagai desain akhir. Aspek perubahan tersebut ada pada model pelaksanaan curah pendapat yang dari pertemuan langsung menjadi pertemuan virtual, *tools* dan fitur digital menggantikan alat dan bahan konvensional, penampilan ide gagasan ditampilkan secara *real time* atau langsung melalui aplikasi berbasis website, dan sosialisasi isu masalah yang diangkat dilakukan lebih awal pada tahap persiapan.

Berdasarkan pengembangan tersebut desain akhir *brainstorming VIP class* menjadi sebuah teknik yang lebih relevan dan lebih mudah diterapkan pada proses - analisis kebijakan sosial pada tahap identifikasi alternatif kebijakan bagi penyandang disabilitas di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur. Desain akhir ini juga menekankan pada efektifitas dan efisiensi waktu dan biaya dalam pelaksanaannya. Dengan demikian desain ini akan meningkatkan partisipasi dan kompetensi para peserta dalam memunculkan ide gagasan alternatif kebijakan. Kemudian pada akhirnya dengan implementasi desain ini akan menghasilkan ide gagasan alternatif

kebijakan yang paling baik sehingga membawa sebuah kebijakan ke arah yang lebih baik dan mencapai tujuan serta manfaatnya yang harapannya pelayanan, perlindungan, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dapat terwujud dengan maksimal.

Pada penyajian akhir dalam penelitian ini adapun hal yang peneliti sampaikan adalah sebagai saran dan masukan bagi dinas atau instansi terkait, bagi khasanah praktik pekerjaan sosial, dan bagi penelitian selanjutnya. Saran maupun rekomendasi kemudian peneliti rangkum dalam penyajian berikut ini :

1. Saran untuk Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur

Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan lokasi dilaksanakannya praktikum analisis kebijakan sosial yang menjadi awal dari penelitian ini dan juga lokasi dilaksanakannya penelitian tindakan partisipatif ini. Sebagai tempat bermulanya desain rekayasa teknologi *brainstorming VIP class* peneliti bermaksud memberikan saran dan masukan. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur diharapkan dapat terus menjadi tempat yang menunjang pengembangan desain teknologi ini selanjutnya. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur dapat menjadi dapat menjalankan evaluasi kebijakan secara lebih mandiri dan berkala untuk menghadapi isu masalah yang mungkin dihadapi selajutnya.

2. Saran untuk Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi yang berwenang dalam melakukan evaluasi analisis kebijakan yang bersifat retrospektif maupun

prospektif secara menyeluruh terutama pada kebijakan bagi penyandang disabilitas. Saran peneliti harapannya teknologi *brainstorming VIP class* dalam diimplementasikan secara berkala dalam proses analisis kebijakan sosial yang ditangani oleh Biro Kesejahteraan Sosial. Usulan alternatif kebijakan yang diusulkan juga diharapkan dapat menjadi tindak lanjut dalam Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah khususnya dalam setting kebijakan bagi penyandang disabilitas.

3. Saran untuk Praktik Pekerjaan Sosial

Desain teknologi *brainstorming VIP class* diharapkan dapat menjadi tawaran teknologi baru yang dapat menambah khasanah praktik pekerjaan sosial khususnya dalam profil analisis kebijakan sosial. Desain teknologi ini dapat mempermudah praktik profesional bagi pekerja sosial dan sebagai sebuah inovasi yang dapat meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan teknologi dalam praktik pekerjaan sosial. Oleh karena itu, peneliti sangat menyarankan kepada rekan-rekan sejawat untuk dapat sama-sama memahami, mengimplementasikan dan mengembangkan kembali teknik *brainstorming VIP class* ini.

4. Saran untuk Penelitian Lanjutan

Peneliti menyarankan penelitian lanjutan setelah penelitian ini agar dapat lebih melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian ini dengan variabel, aspek, dan lokasi penelitian yang berbeda maupun serupa yang harapannya dapat menghasilkan temuan penelitian yang lebih aktual. Saran untuk penelitian lanjutan peneliti rangkum dalam penyajian berikut ini :

- a) Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengimplementasikan desain akhir dari penelitian ini, untuk melihat keefektifan

- dan efisiensinya dalam kegiatan identifikasi alternatif kebijakan.
- b) Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengimplementasikan desain akhir dari penelitian ini, untuk melihat temuan-temuan baru yang dapat dijadikan pengembangan desain akhir penelitian ini agar lebih relevan dalam perkembangan zaman dan teknologi.
  - c) Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengaplikasikan desain akhir penelitian ini pada kegiatan yang berbeda. Bukan hanya terbatas dalam identifikasi alternatif kebijakan saja melainkan pada tahapan analisis kebijakan yang lainnya ataupun juga pada setting praktik yang berbeda.
  - d) Penelitian lanjutan diharapkan juga dapat mengaplikasikan desain akhir ini di lokasi yang berbeda.
  - e) Penelitian lanjutan diharapkan dapat menjalankan proses penelitian, memilih pendekatan dan desain penelitian serta teknik yang lebih baik sehingga dapat melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian sebelumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah Awan Y. & Rustiana Yudi. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar Muh. Firyal & Mohi Widya Kurniati. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Andini, Friska. (2020). Upaya Meningkatkan Kemampuan Menarik Kesimpulan Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Materi Teks Tanggung Jawab Warga Negara melalui Metode Mind Mapping. *Jurnal STKIP Kusuma Negara*. Vol.1.,No.,5.,pp.45-50.
- Andriani Nurul Saadah. (2016). Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional. *JURNAL PALASTREN*, Vol. 9, No. 1.,pp.189-214.
- Dewi Rahayu Kusuma. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia
- Fardiah, Dedeh. (2005). "Focus Group Discussion" dalam Paradigma Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Komunikasi*. Vol.6., No.1.,pp.95-108.
- Fedryansyah Muhammad. (2016). Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. *Social Work Jurnal* Vol. 6.,pp.136-147.
- Hasibuan Khairani. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang*. Palembang. Unsri.
- Hosaini & Rinwanto. (2021). *Pengantar Metodologi Participatory Action Research*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Khasanah. (2021). Efektifitas Media Whatsapp Group Dalam Pembelajaran Daring. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol.10., No.1.,pp.47-65.
- Kurniawan, Adam Muhammad. (2018). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah : Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Klien Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "Teratai"* Yogyakarta. Yogyakarta. UNY.
- Kristiana, Agit., dkk. (2021). *Panduan Optimalisasi Peran Jabatan*

- Fungsional Analisis*  
*Kebijakan.LANRI.*
- Madya, Suwarsih. (2011). *Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung:Alfabeta
- Mansyur Mutmainna. (2021). *Aksesibilitas Berdasarkan Persepsi Pengguna Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (Brspdf)* Wirajaya Makassar.Gowa.Unhas.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Nove, Albertus Hengka., Agus Basuki., Sunaryo Alidha Sunaryo. (2021). Efektivitas teknik diskusi dalam bimbingan kelompok untuk membantu dalam perencanaan karir siswa.*Jurnal Konseling dan Pendidikan*. Vol.9.,No.4., pp.366-371.
- Nugroho, Riant. (2020). *Public Policy edisi keenam “Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kriteria Kebijakan Publik”*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Patton, Carl V., Sawicki David S., Clark Jennifer J. (2016). *Basic Method of Policy Analysis and Planning third edition*. New York: Routledge.
- Prabawati, Indah., Rahaju Tjitjik., dan Kurniawan badrudin. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Unesa University Press.
- Subasno Yohanes. (2016). *Masalah Disabilitas Dan Sosial Kemasyarakatan*.*Jurnal*
- Kateketik dan Pastoral*. Vol.1.,No.2.,pp.65-76.
- Kadek Januarsa Adi Sudharma. (2015). *Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada Badan Hukum Nirlaba Di Bali*.Denpasar.Universitas Udayana
- Saputro, Sugeng Esa. (2022). *Laporan Praktikum Analisis Kebijakan Sosial Pengembangan Teknik Brainstorming Melalui Visualisation In Participatory Programmes Dalam Tahapan Identifikasi Alternatif Kebijakan Pada Program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta*. Bandung. Poltekesos.
- Sudarwati Erlin. (2016). *Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI*.Jakarta.Kemhan RI.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto Edi. (2011). *Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Dinamika Perkembangan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Suharto Edi. (2020). *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*.Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman dan Hendrianto. (2022).*Pekerjaan Sosial:Teori dan Metodologi*.Jakarta
- Yaumi Muhammad & Damopolii Muljono. (2016). *Action Research (Teori, Model, dan Aplikasi)*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Yulaswati Vivi dkk. (2021). *Kajian Disabilitas Tinjauan*



Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis. Jakarta. Kementerian PPN/Bappenas..

Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare (12th ed.)*. Boston, USA: Chengage Learning.

#### Sumber Lain :

Aurel, Shafira. (2022). "Menaker: Ironi, Jumlah Pekerja Disabilitas Menurun". KBR.id <https://kbr.id/nasional/11-2022/menaker-ironi-jumlah-pekerja-disabilitas-menurun/110200.html#:~:text=Data%20BPS%20per%202021%20mencatat,dari%20total%20penduduk%20yang%20bekerja>. Diakses pada 10 Januari 2023 pukul 10.36.

LP2M. (2023). "Survei Elektronik: Apa itu, Manfaat dan Kekurangannya". <https://lp2m.uma.ac.id/2023/01/10/survei-elektronik-apa-itu-manfaat-dan-kekurangannya/>. diakses 1 Juli 2023 pukul 16.34.

Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.(2021). [https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data\\_puu/PERMENAKER\\_3\\_2021-.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PERMENAKER_3_2021-.pdf).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Dan Angka Kreditnya.(2013).<https://peratur>

[an.bpk.go.id/Home/Details/132808/permen-pan-rb-no-45-tahun-2013](https://an.bpk.go.id/Home/Details/132808/permen-pan-rb-no-45-tahun-2013).

Pusat Studi Individu Berkebutuhan Khusus Universitas Sanata Dharma.(2018). "Faktor Penyebab Tuna Daksa". <https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2018/11/28/faktor-penyebab-tuna-daksa/>. Diakses pada 10 Januari 2023 pukul 10.29.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas(2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

Violetta,PriscaTrivena.(2020)." Pengamat: Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih jadi masalah . <https://www.antaraneews.com/berita/1623694/pengamat-aksesibilitas-bagi-penyandang-disabilitas-masih-jadi-masalah>. diakses pada 10 Januari 2023 pukul 10.01.

WHO SEARO. (2016)."Setiap Tahun, Ratusan Ribu Bayi di Indonesia Lahir dengan Kelainan Bawaan". Kompas.com <https://health.kompas.com/read/2016/03/03/212900323/Setiap.Tahun.Ratusan.Ribu.Bayi.di.Indonesia.Lahir.dengan.Kelainan.Bawaan>. diakses 10 Januari 2023 pukul 09.45.